



Kejari Telusuri Proyek Swakelola SD yang Dicurigai Sarat Permainan

Semarapura (Bali Post) -

Munculnya kecurigaaan terhadap proyek swakelola sejumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Klungkung yang sarat permainan, rupanya menjadi atensi Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung. Bahkan, hal tersebut akan ditelusuri guna memastikan kebenarannya.

Kasi Intel Kejari Klungkung Cakra Yuda, Rabu (6/9) kemarin mengungkapkan, proyek yang digulirkan melalui Dinas Pendidikan itu masih tahap pengerjaan. Meski demikian, menindaklanjuti informasi yang berembus di lapangan, pihaknya akan menerjunkan anggota untuk melakukan penelusuran. Langkah ini penting

untuk mengetahui kondisi riil. "Kalau cek fisik belum bisa karena masih pengerjaan. Tapi untuk informasi itu akan segera kami telusuri," ungkapnya.

Proyek tersebut, katanya, memang rawan terjadinya penyimpangan. Demikian juga dari sisi kualitas yang tak sesuai ketentuan. Mengantisipasi itu, masyarakat

maupun pemerintah desa juga diharapkan turut melakukan pengawasan. "Kami berharap pembangunan seperti ini harus saling mengawasi. Dinas, sekolah dan panitia pelaksana juga harus transparan. Ini juga berlaku untuk proyek lain," ungkapnya.

Sebelumnya, sesuai informasi dari Disdik Klungkung,

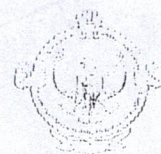
proyek swakelola tahun ini dianggarkan Rp 3,8 miliar lebih yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Silpa DAK. Itu sebagian besar digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas. Beberapa di antaranya SDN 3 Tihingan senilai Rp 230 juta, SDN 3 Getakan Rp 275 juta, SDN 3 Semarapura Kelod Rp 230 juta, dan SDN 5 Ped Rp 240 juta. Di tengah anggaran yang cukup besar, dalam menggulirkan proyek ini, muncul desas-desus di lapangan.

Dinas Pendidikan ditengarai telah menentukan

pelaksana yang terlibat dalam pengerjaan. Cara ini dikemas rapi. Pelaksana dengan panitia sekolah tidak menyertakan kontrak secara tertulis. Hal tersebut secara otomatis menjadikan proyek tersebut seolah-oleh hanya dikelola langsung panitia. Proyek Penunjukan Langsung dengan anggaran Rp 4,3 miliar yang bersumber dari APBD juga ditengarai demikian. Penentuan pelaksana tidak dilakukan secara profesional. Namun, hal tersebut dibantah keras Kepala Dinas Pendidikan Dewa Gede Darmawan. (kmb45)

Edisi : Kamis, 7 Sept 2017

Hal : 10



Belasan Mobdin di DPRD Segera Ditarik

Singaraja (Bali Post) -

Pemakaian mobil dinas (mobdin) di Sekretariat DPRD Buleleng dipastikan akan dihentikan dalam waktu dekat ini. Tercatat ada 16 unit mobdin ditarik menyusul terbitnya kebijakan pemerintah pusat memberikan tunjangan transportasi kepada pimpinan dan anggota DPRD. Menyusul kebijakan ini di DPRD nantinya hanya ada mobdin sewaan milik PD Swatantra untuk pejabat di lembaga ini dan satu unit mobdin jenis minibus untuk kepentingan anggota dan Sekretariat DPRD.

Data dikumpulkan di lapangan menyebutkan, 16 unit mobdin digunakan oleh pimpinan, Ketua Fraksi, Ketua Komisi, Ketua Badan Kehormatan (BK), dan Ketua Badan Legislasi (Baleg). Ketua Dewan saat ini menggunakan Toyota Fortuner dan tiga wakil ketua masing-masing mendapat mobdin tipe sedan Toyota Vios. Sementara, para ketua fraksi, komisi, BK dan Ketua Baleg sekarang masing-masing mengendarai Kijang Innova.

Menyusul terbitnya (PP) No. 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD

otomatis pengoperasian mobdin tersebut dihentikan. Pemkab sekarang telah menyusun peraturan daerah (perda) sebagai turunan dari PP tersebut. Selain menyiapkan regulasi, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah mengalokasikan anggaran untuk tunjangan transportasi tersebut melalui APBD Perubahan 2017 ini. Pimpinan DPRD akan mendapat tunjangan transportasi Rp 14 juta per bulan. Sementara anggota dewan dijatah Rp 12 juta setiap bulan.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Buleleng Gede Wisnawa di ruang kerjanya, Rabu (6/9)

kemarin, mengatakan lembaga dewan sejauh ini belum membahas terkait kapan penyerahan mobdin yang dioperasikan. Hanya, terkait penarikan mobdin tersebut sudah diketahui oleh pimpinan dan anggota dewan. Meski demikian, dalam waktu dekat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan unsur pimpinan untuk membicarakan terkait penarikan belasan mobdin tersebut. Selain diputuskan oleh pimpinan dan anggota dewan, sekretariat dewan akan melakukan kajian terkait penarikan mobdin tersebut. Ini sekaligus melengkapi syarat

ketika nantinya mobdin sebagai aset daerah diserahkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Buleleng. "Kalau pembahasan resmi memang belum, namun karena ini sudah kebijakan pimpinan dan anggota sudah banyak yang tahu bahwa nanti mobdin akan ditarik. Kita juga sudah koordinasi dengan BKD dan nantinya akan kita buat kajian untuk melengkapi penyerahan mobdin ini," katanya.

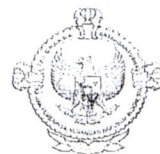
Sementara itu, informasi lain menyebutkan, BKD tidak berwenang menarik mobdin di lingkungan sekretariat DPRD. BKD hanya menerima setelah instansi yang memanfaatkan barang milik daerah menyerahkan asetnya karena memang tidak dimanfaatkan. Instansi bersangkutan wajib untuk melakukan kajian menyangkut pertimbangan mengapa aset yang diberikan justru dikembalikan kepada pemerintah



Bali Post/kmb38

Gede Wisnawa

daerah. Jika persyaratan itu sudah dipenuhi, BKD tinggal menerima aset tersebut dan menunggu petunjuk pimpinan di daerah terkait kebijakan pemanfaatan aset tersebut. (kmb38)



Soal Aset Tanah di Unhi

Pemprov Tetap Minta Biaya Sewa

Denpasar (Bali Post) -

Pemprov Bali sampai saat ini masih menunggu rekomendasi DPRD Bali terkait aset tanah di Universitas Hindu Indonesia (Unhi). Kendati dalam rapat bersama Pansus Aset beberapa waktu lalu, dewan sempat mengusulkan agar aset seluas 2,743 hektar itu dihibahkan. Namun, eksekutif sejatinya tetap bersikukuh agar Unhi membayar biaya sewa, sehingga tidak lagi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kita kan masih menunggu rekomendasi dari dewan karena kemarin, rapat di DPRD itu mau mengadakan pengecekan di lapangan dulu. Kalau Pemprov sih bertahan ke sewa karena tarifnya sudah turun," ujar Kepala UPT Pengamanan Aset Pemprov Bali Ketut Nayaka, Rabu (6/9) kemarin.

Menurut Nayaka, saat ini sudah ada penurunan tarif sewa aset sesuai Perda tentang Retribusi Jasa Usaha.

Sebelumnya dalam aturan lama, biaya sewa untuk pendidikan dipatok Rp 20 ribu per meter persegi per tahun. Namun di dalam perda baru, secara khusus diatur tarif untuk pendidikan bernuansa keagamaan sebesar Rp 10 ribu per meter persegi per tahun. Artinya, Unhi tidak perlu membayar tarif sewa hingga Rp 500 juta lebih. Namun hanya sebesar kurang lebih Rp 274 juta per tahun.

"Itulah kita sebenarnya masih menginginkan adanya pemasukan ke Pemprov untuk peningkatan PAD-nya. Tapi tergantung sekarang rekomendasi DPRD. Kalau kita di eksekutif sih inginnya supaya ada kontribusi," jelasnya.

Nayaka menambahkan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi Unhi bila nantinya dewan merekomendasikan agar tanah itu dihibahkan. Syarat yang paling utama adalah harus ada audit keuangan dan keterangan pada akta pendirian bahwa yayasan memang benar

melaksanakan pendidikan tidak berorientasi bisnis. Dalam hal ini, klaim sebagai universitas Hindu satu-satunya saja masih belum cukup.

Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry berharap status hak pinjam pakai aset tanah Pemprov di Unhi bisa ditingkatkan. Entah menjadi hak milik dalam bentuk hibah atau hak pengelolaan. Mengingat, Unhi merupakan satu-satunya universitas Hindu yang ada di Indonesia. Pihaknya merasa berkewajiban untuk membantu Unhi maju dan berkembang.

"Kami dari DPRD justru berharap bahwa status hak pinjam pakai itu bisa ditingkatkan, apakah menjadi hak milik dalam bentuk hibah atau hak pengelolaan sehingga dengan demikian status tanah itu menjadi jelas dan menjadi hak dari Unhi dalam rangka memperkuat akreditasi mereka di Dikti," ujarnya.

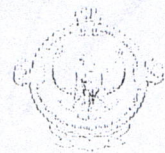
Menurut Sugawa Korry,

pansus aset kini sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk BPN terkait status tanah itu ke depan. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada semua civitas akademika Unhi termasuk mahasiswa dan orangtua agar tidak perlu khawatir bila tanah itu akan ditarik oleh pemprov. Dewan justru ingin memperkuat statusnya dan memberikan aspek legalitas kepada universitas Hindu satu-satunya yang bernaung di bawah PHDI itu.

"Jadi, harus kita dukung dan bela sehingga mereka bisa tetap eksis untuk memperkuat sumber daya manusia Hindu yang ada di Indonesia ini. Nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan BPN sehingga tanah itu ke depan tidak gampang dipindahtangankan atau menjadi kecemburuan lembaga pendidikan yang lain (yang sudah membayar sewa aset pada Pemprov - red)," ujar politisi Golkar ini. (kmb32)

Edisi : Kamis, 7 Sept 2017

Hal : 7



Sidang Kasus Korupsi Alkes RSUD Mangusada

Lelang Amburadul, Pemenang Tender Sempat Gugur

Denpasar (Bali Post) -

Sidang dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD Mangusada kembali dilanjutkan, Rabu (6/9) kemarin. Sidang dengan dua terdakwa dilakukan secara terpisah. Untuk terdakwa I Ketut Sukartayasa (48) langsung memeriksa lima orang saksi, di antaranya dari panitia lelang, sedangkan terdakwa Muhammad Yani Kanifudin (42) membacakan eksepsi.

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Wayan Sukanila, terungkap dari keterangan saksi dari panitia lelang atau pengadaan bahwa pihak panitia sampai tiga kali melakukan lelang. Mirisnya, PT Mapan Medika Indonesia (MMI) yang akhirnya menggarap proyek alat kelengkapan di RS Mangusada tersebut, tahap lelang pertama MMI sudah dinyatakan gugur. Alasannya, tidak lengkap. Kondisi inilah memantik pertanyaan hakim, mengapa MMI yang sudah gugur di lelang pertama justru akhirnya menjadi pemenang.

Saksi dari panitia lelang juga mengatakan bahwa PT MMI sempat ingin mengundurkan diri dengan dalih tidak sanggup. Namun saat itu, ada

ancaman bahwa jika namanya masuk daftar lelang kemudian mengundurkan diri, maka panitia lelang akan mem-black list perusahaan MMI.

Namun faktanya, MMI tetap melaju pesat hingga mengalahkan peserta lelang lainnya yang masuk hingga 31 perusahaan dan yang lulus ke tahap berikutnya delapan perusahaan dan panitia sepakat memenangkan MMI.

Di sini hakim kembali mengkritik lelang di Badung yang dinilai amburadul. "Kalau MMI nggak sanggup, dari awal mestinya memundurkan diri. Jangan mengajukan penawaran," sentil hakim pada saksi panitia lelang.

Di samping itu, dalam sidang juga diburu soal siapa yang membuat dan menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 24,5 miliar. Dalam sidang terungkap bahwa yang menentukan HPS adalah PPK. Namun, saksi tidak tahu siapa yang menilai besarnya HPS. Saksi tahunya sudah ada drafnya.

Hakim juga sempat menanyakan siapa saja terlibat dalam proyek ini selain panitia lelang. Saksi menyebut ada KPA, PPK, PPTK dan bendahara. Ada juga dibentuk unit

penerima barang, penerima hasil kegiatan atau pekerjaan.

Sementara itu, terdakwa Muhammad Yani Kanifudin sebagai Dirut PT Mapan Medika Indonesia (MMI) melalui kuasa hukumnya Hadi Apri Handoko mengatakan bahwa kliennya merupakan korban persekongkolan. Di hadapan majelis hakim, tim kuasa hukum terdakwa MMI di depan persidangan mengatakan bahwa PT MMI dipinjam oleh Ketut Budiarsa yang juga sebagai peserta lelang, dengan dalih dijadikan sebagai pendamping PT Gama Bali Dwipa. Sehingga, terdakwa menyetujui dengan beberapa syarat. "Terdakwa (Dirut MMI) tidak mengetahui jika perusahaannya dijadikan sebagai pemenang," katanya di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Terdakwa tahu itu setelah dihubungi ULP saksi I Ketut Sukartayasa, dalam hal untuk melakukan verifikasi. Atas berbagai alasan dalam eksepsinya, Hadi April Handoko selaku kuasa hukum terdakwa Muhammad Yani Kanifudin meminta majelis hakim mengabulkan eksepsi terdakwa dan menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum. (kmb37)

Edisi : Kamis 7 Sept 2017

Hal : 2